

Evaluasi Semester I Kinerja KPK Pasca Revisi UU & Suksesi Kepemimpinan

Periode Survei Kebijakan Publik

7 - 18 Juni 2020



Universitas Paramadina, Jakarta
Jl. Gatot Subroto No.Kav. 97, Mampang Prapatan,
Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12790,
T +6221 79181188, F:+6221 79181188,
W: <https://policy.paramadina.ac.id>

Pengantar

- Sejak tahun 2006 hingga 2018, sejumlah lembaga survei yang kredibel selalu menempatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di posisi juara dalam kategori lembaga paling dipercaya masyarakat (*the most trusted state-institution*). Tetapi, tren kecermelangan itu tampaknya terkoreksi cukup serius pada tahun 2019 hingga awal 2020 ini, dimana KPK sempat terlempar dari posisi tiga besar lembaga yang dipercaya publik (Lembaga Survei Indonesia, 2019; Indikator Politik Indonesia, 2020).
- Tahun 2019 lalu, KPK telah menghadapi tantangan besar berupa perubahan Undang-Undang (UU) dan juga pergantian kepemimpinan lembaga. Kedua hal tersebut berpotensi menimbulkan dampak signifikan terhadap kinerja KPK secara kelembagaan. Terhitung sejak pengesahan UU No.19/ 2019 tentang KPK pada Oktober 2019 dan pergantian kepemimpinan KPK pada Desember 2019, kini mesin baru KPK telah berjalan selama enam bulan.
- Kinerja semester pertama ini setidaknya bisa menjadi basis evaluasi awal untuk memahami bagaimana dampak kedua peristiwa tersebut terhadap efektivitas KPK, yang selama ini dianggap sebagai mesin anti-korupsi yang paling efektif dalam sejarah negeri ini (UNODC, 2017; Raymond Magsaysay, 2012).

Pengantar

- Evaluasi kinerja awal KPK ini diharapkan bisa menjadi refleksi, lecutan, sekaligus poin perbaikan bagi kinerja KPK ke depan. Sebab, KPK merupakan tumpuan utama harapan rakyat dan cita-cita reformasi bagi hadirnya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan juga pemerintahan yang bersih (*clean government*).
- Untuk menilai kualitas kinerja mesin anti-korupsi, penting juga untuk memahami dinamika politik kekuasaan yang berkembang (*nature of power*), sebagai faktor penting yang menentukan arah kebijakan politik anti-korupsi suatu negara (Transparency International, 2012; Quah, 2009; Brown, 2010).
- Untuk itu, Paramadina Public Policy Institute (PPPI) menyelenggarakan survei elit (*elite survey*) untuk memahami arah politik anti-korupsi di Indonesia, dan juga untuk menilai dampak perubahan UU dan pergantian kepemimpinan terhadap KPK secara kelembagaan.
- Penggunaan survei elit ini ditujukan agar penilaian terhadap kinerja KPK lebih didasarkan pada basis penilaian yang genuin, independen dan tidak bias oleh faktor afiliasi politik publik (*partisanship*).

Metode

- Responden survei ini terdiri atas kalangan *stakeholders* independen, yang terdiri atas segmen sosial yang memiliki kapasitas pemahaman yang memadai tentang dinamika politik anti-korupsi di Indonesia dan juga peran KPK dalam isu sentral pemberantasan dan pencegahan korupsi di tanah air.
- *Data gathering* dari survei elit ini dilakukan secara online, sebagai konsekwensi atas pelaksanaan PSBB di tengah pandemi Covid-19. Kalangan yang terkategori “elite repondents” ini meliputi kalangan aktivis anti-korupsi, intelektual kampus, peneliti lembaga riset, jurnalis media, pakar kebijakan publik, *policy advisor* di bidang ekonomi dan tata kelola pemerintahan, dan juga tokoh sosial-keagamaan.
- Tentu sangat banyak yang masuk ke dalam kelompok ini, tapi dengan keterbatasan akses dan waktu, jumlah yang bisa digali pendapatnya sebanyak 60 orang, yang ditentukan secara *purposive non-probabilistic* berdasarkan kesesuaian dengan kriteria berupa kapasitas pemahaman yang memadai tentang kebijakan anti-korupsi dan kinerja KPK. Komposisi responden sebagai berikut:

No	Latar belakang	Jumlah
1.	Aktivis anti-korupsi	10
2.	Dosen bidang kajian anti-korupsi	10
3.	Jurnalis bidang hukum dan anti-korupsi	10
4.	Policy advisor bidang ekonomi & tata kelola pemerintahan	10
5.	Peneliti kebijakan publik	10
6.	Tokoh organisasi sosial & keagamaan	10
	Total	60

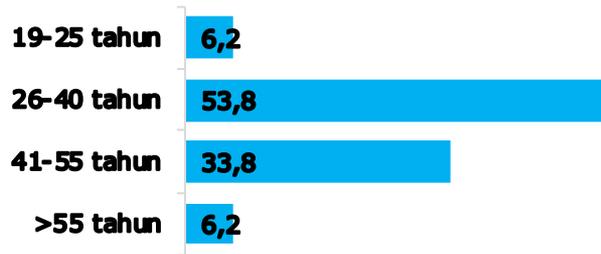
Metode

- Pengawasan kualitas dilakukan dengan melakukan *callback* atau menelepon kembali 25% responden untuk memastikan pengisian instrumen survei telah dilakukan sesuai dengan prosedur, kriteria dan ketentuan yang tepat. Dalam proses pengawasan kualitas, tidak ditemukan kesalahan yang berarti.
- Catatan: hasil survei tidak ditujukan untuk membuat generalisasi terhadap populasi karena pengambilan sampel dilakukan secara *non-probabilistic*.

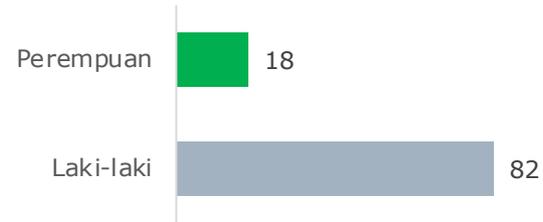
PROFIL RESPONDEN

PROFIL RESPONDEN

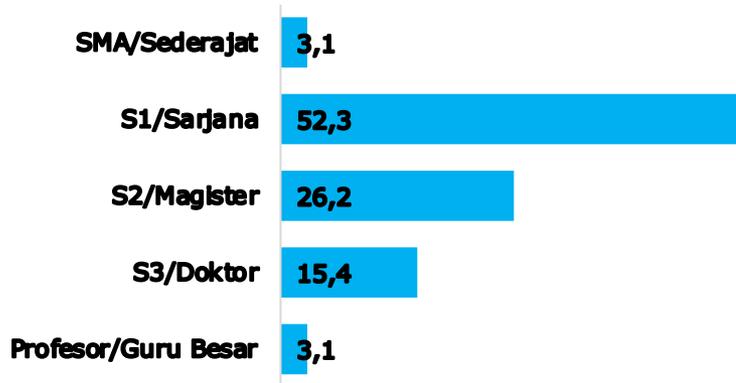
Kelompok usia (%)



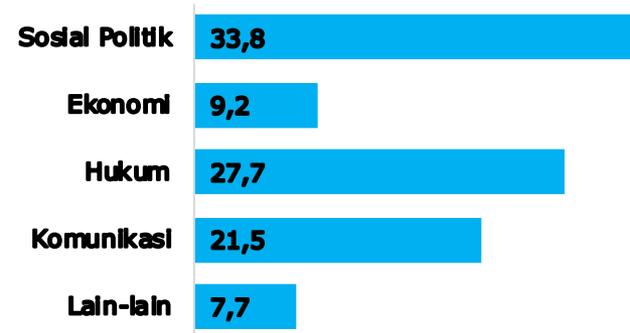
Jenis kelamin (%)



Pendidikan terakhir (%)

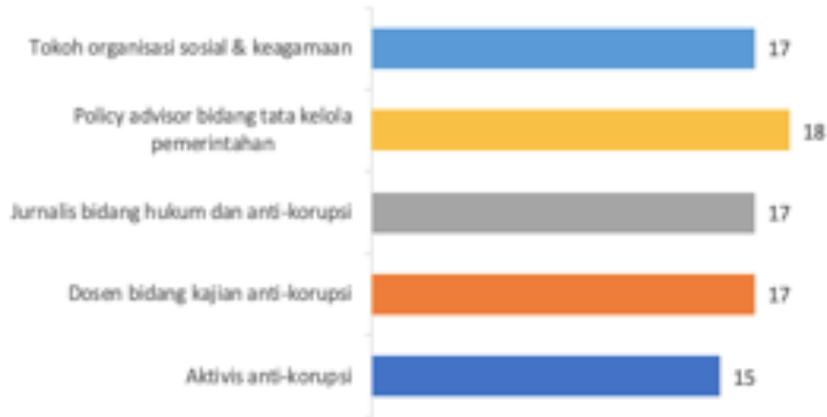


Bidang keilmuan (%)

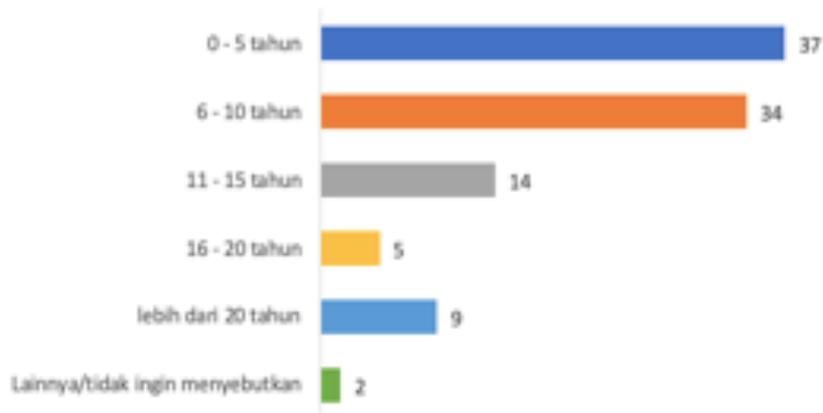


PROFIL RESPONDEN

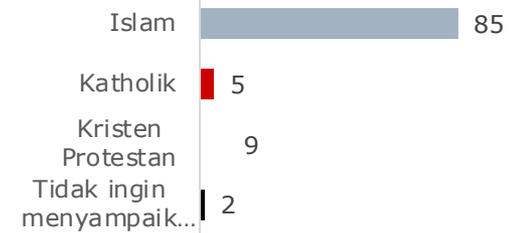
Bidang pekerjaan (%)



Lama bekerja di lembaga asal (%)



Agama (%)



SEKTOR RESPONDEN

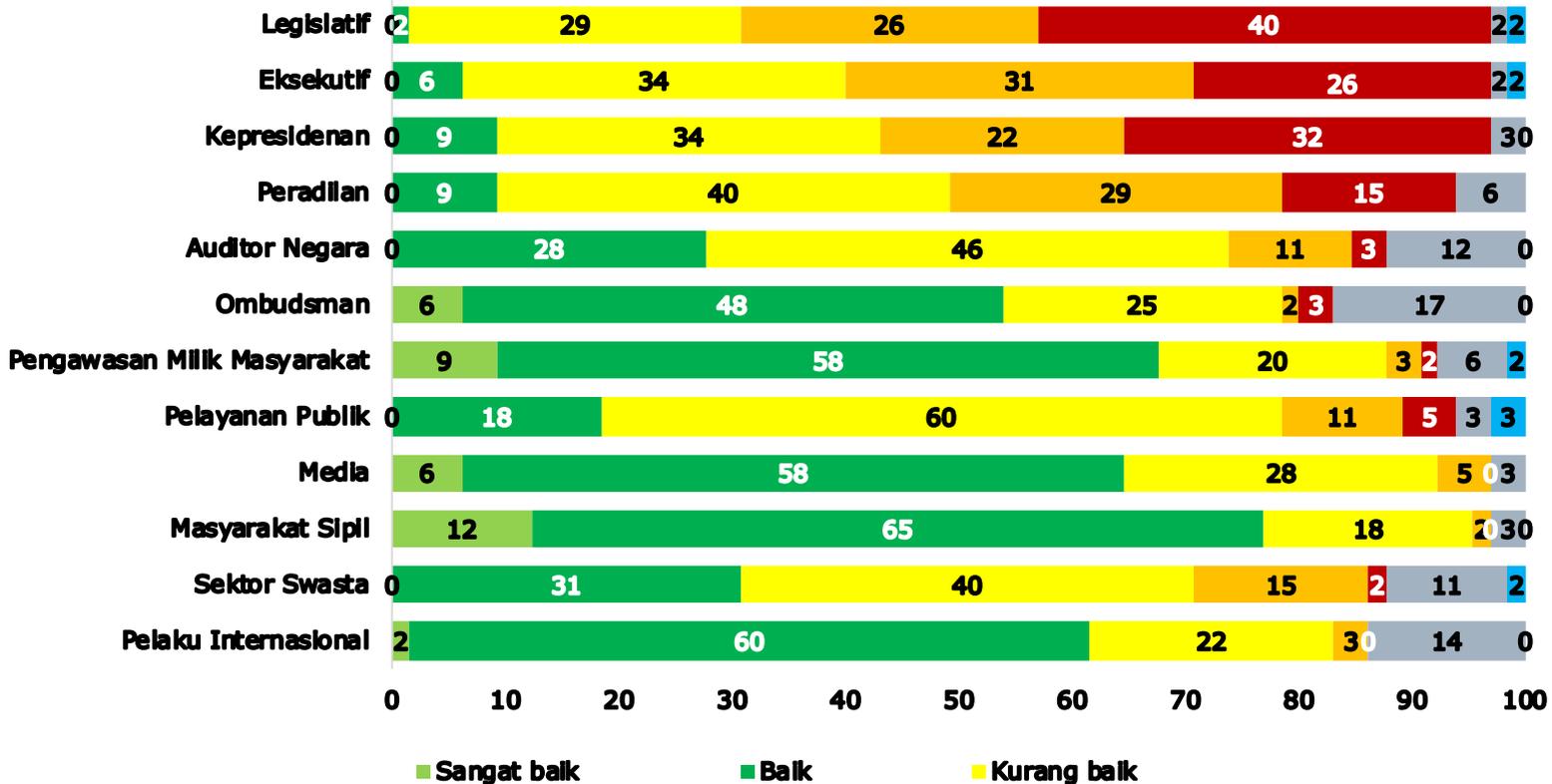


Responden survei ini berasal dari tiga sektor, yakni infrastruktur 32.2%, perizinan 35.6%, dan kepebeanaan 32.2%.

PENILAIAN TERHADAP PILAR-PILAR SISTEM INTEGRITAS NASIONAL (SIN)

Penilaian Pilar Sistem Integritas Nasional (SIN)

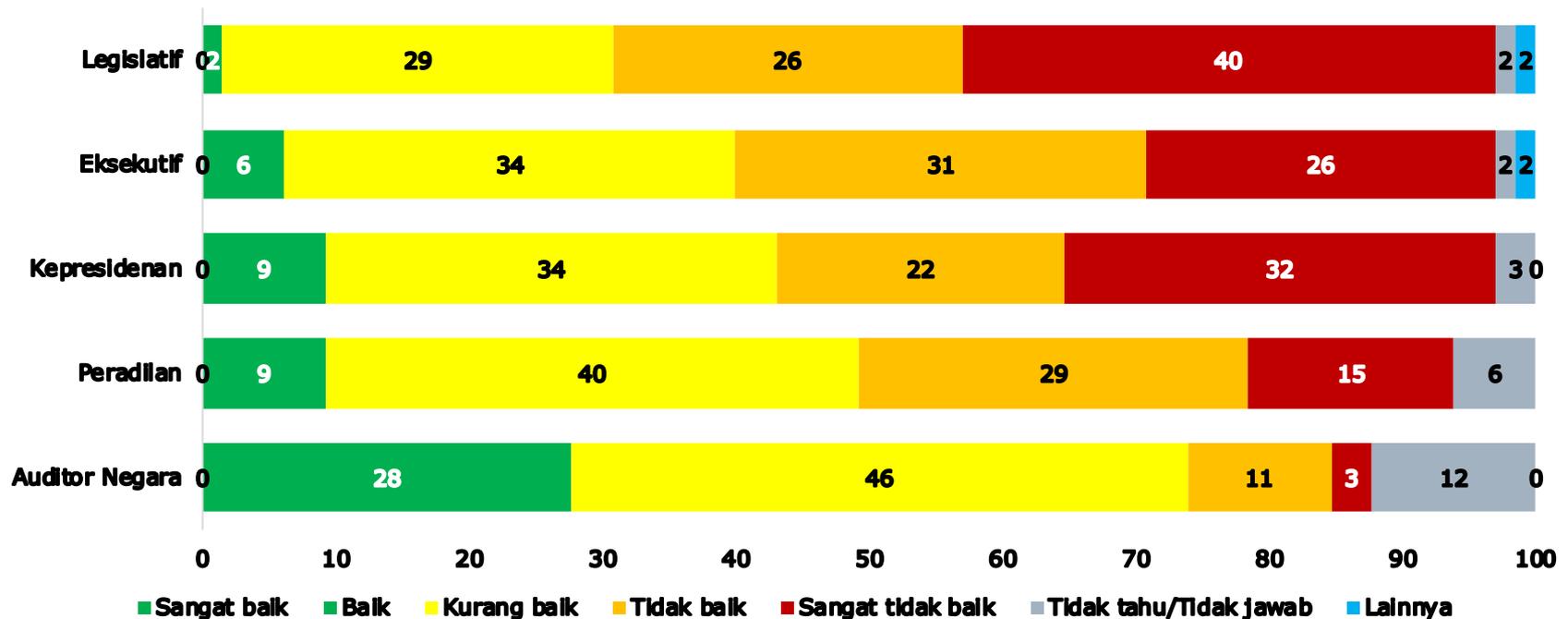
Bagaimana penilaian Anda terhadap komiten anti-korupsi lembaga-lembaga negara ini selama setahun belakangan ini?



Integritas lembaga Parlemen, Pemerintah, Lembaga Kepresidenan dan Peradilan dianggap sebagai empat pilar SIN yang paling bermasalah. Empat lembaga yang menjadi pusat kekuasaan politik dan hukum negara itu dinilai mengidap problem struktural yang masih korup.

Penilaian Pilar Sistem Integritas Nasional (SIN)

Bagaimana penilaian Anda terhadap komiten anti-korupsi lembaga-lembaga negara ini selama setahun belakangan ini?



Di tengah lingkungan politik dan hukum yang dinilai korup, lembaga anti-korupsi akan cenderung menjadi musuh bersama (*common enemy*) lainnya “Ustad di kampung maling”.

Temuan

- Dari 12 simpul kekuatan negara yang dianggap sebagai pilar Sistem Integritas Nasional (SIN), integritas lembaga Parlemen, Pemerintah, Lembaga Kepresidenan dan Peradilan masih dianggap sebagai empat pilar SIN yang paling bermasalah.
- Problemanya, empat lembaga besar yang bermasalah itu merupakan pusat kekuasaan politik dan hukum negara. Di tengah peta pilar integritas nasional seperti ini, agenda penegakan korupsi akan selalu berhadap-hadapan dengan struktur kekuasaan yang ditopang oleh seluruh sumber daya berkekuatan besar.
- Di tengah lingkungan politik dan hukum yang korup, lembaga anti-korupsi akan cenderung menjadi musuh bersama (*common enemy*) lainnya “Ustad di kampung maling”. Akibatnya, para aktor pejuang dan lembaga anti-korupsi cenderung menjadi para pahlawan yang kesepian (*the lonely hero*) dan di-bully oleh kelompok-kelompok yang terusik zona nyamannya dengan membajak instrumen negara.

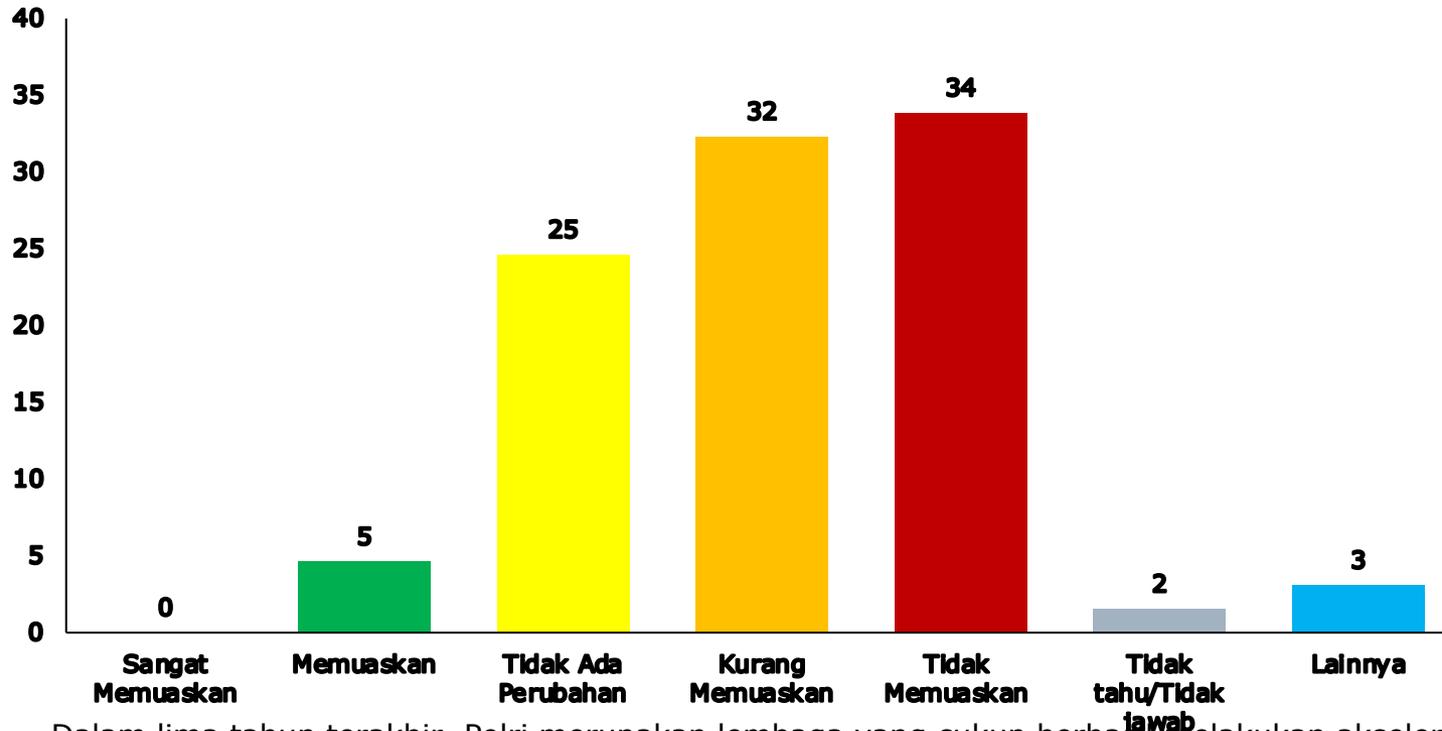
PENILAIAN TERHADAP MESIN ANTI-KORUPSI

Anti-Corruption Agency Vs Multi-Anti Corruption Agencies

Penilaian terhadap Mesin Anti-Korupsi

Bagaimana penilaian Anda terhadap kinerja mesin anti-korupsi Polri selama setahun terakhir?

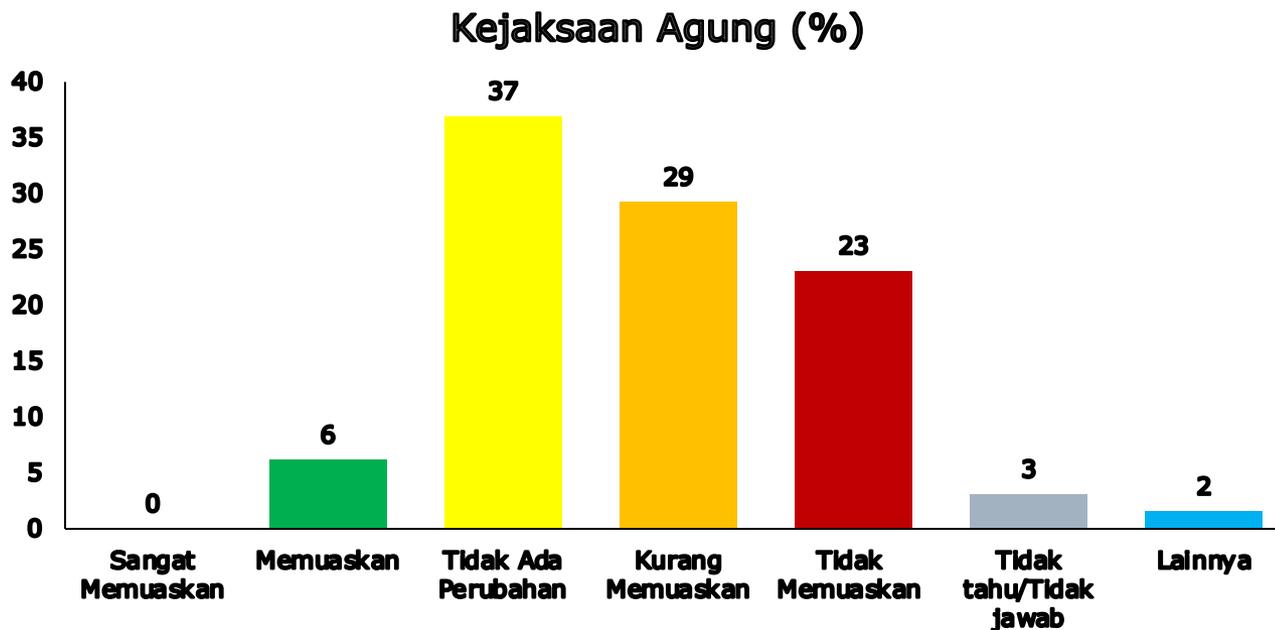
Kepolisian Republik Indonesia (%)



Dalam lima tahun terakhir, Polri merupakan lembaga yang cukup berhasil melakukan akselerasi peningkatan kepercayaan publik terhadap lembaganya. Namun terkait kerja-kerja pencegahan dan pemberantasan korupsi, kinerja Polri dianggap belum memadai (66%).

Penilaian terhadap Mesin Anti-Korupsi

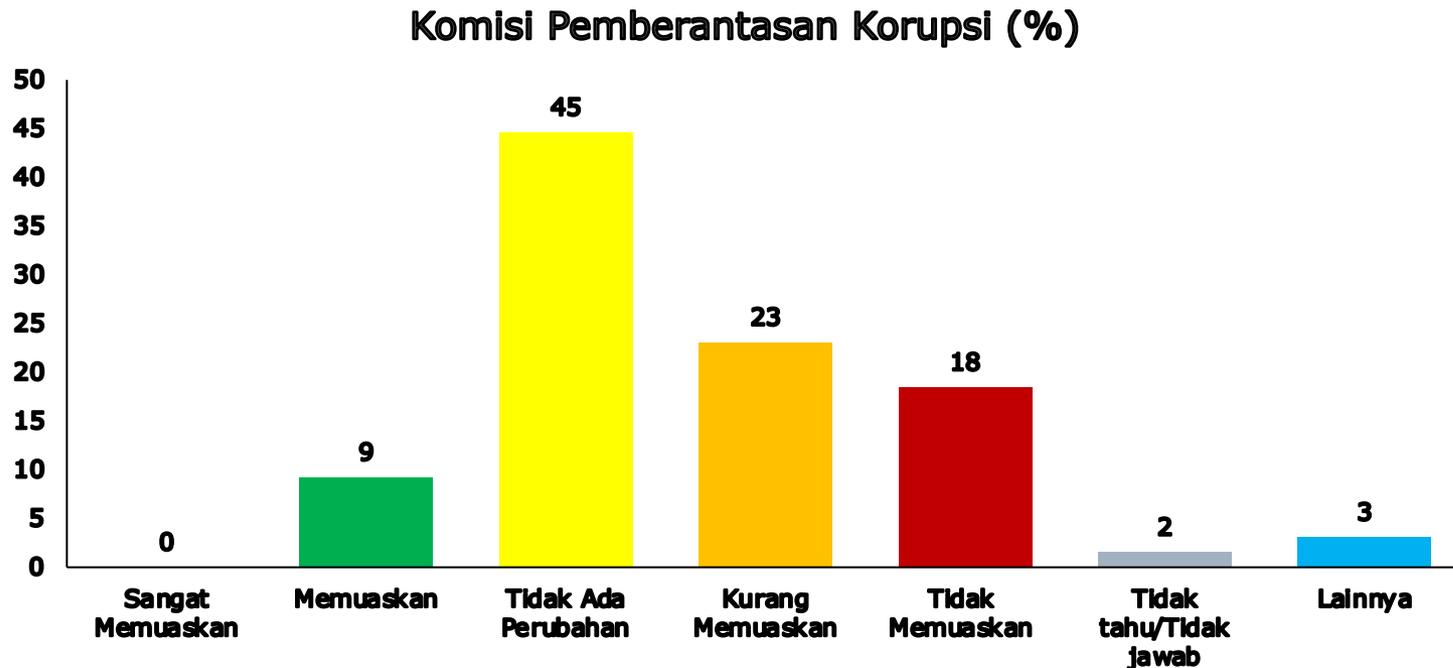
Bagaimana penilaian Anda terhadap kinerja mesin anti-korupsi Kejaksaan Agung di Indonesia selama setahun terakhir?



Mayoritas responden (51%) cenderung menilai kinerja Kejaksaan Agung masih belum baik dalam menjalankan fungsi pemberantasan dan pencegahan korupsi.

Penilaian terhadap Mesin Anti-Korupsi

Bagaimana penilaian Anda terhadap kinerja mesin anti-korupsi KPK selama setahun terakhir?

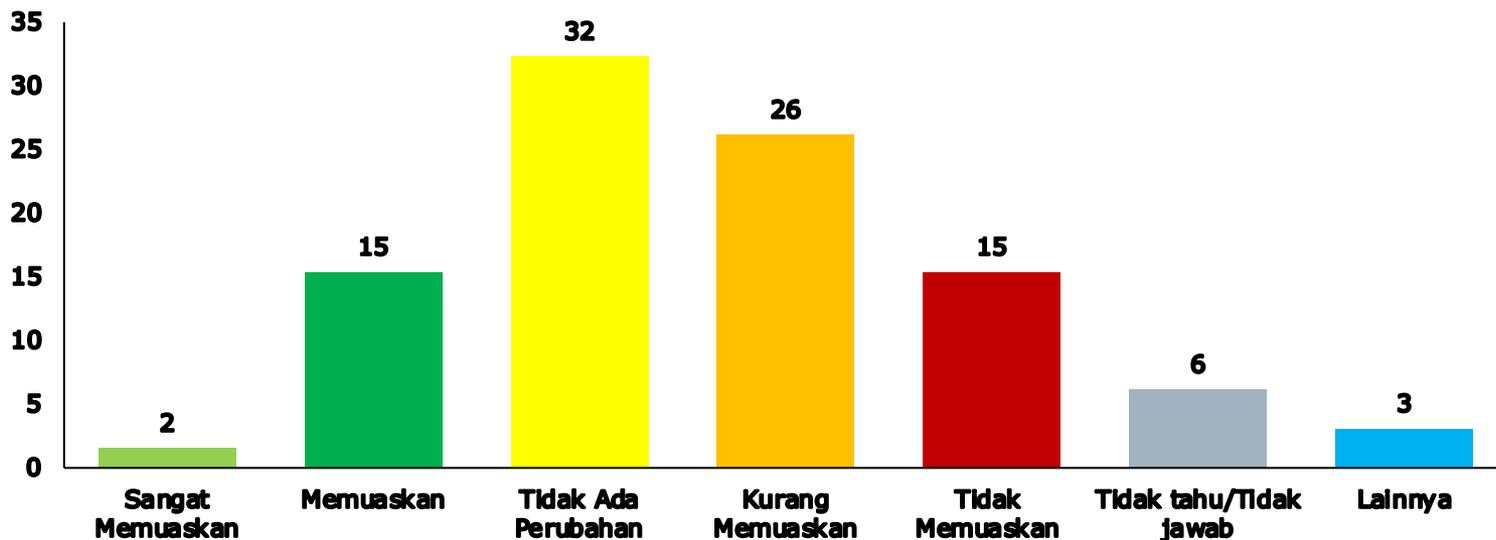


Sebanyak 45% responden menilai kinerja KPK belum optimal. Bahkan sudah mulai muncul kekecewaan di kalangan *stakeholders* terhadap kinerja KPK (41%) yang dinilai masih jauh dari harapan publik

Penilaian terhadap Mesin Anti-Korupsi

Bagaimana penilaian Anda terhadap kinerja Korsup yang melibatkan semua lembaga anti-korupsi di Indonesia selama setahun belakangan ini?

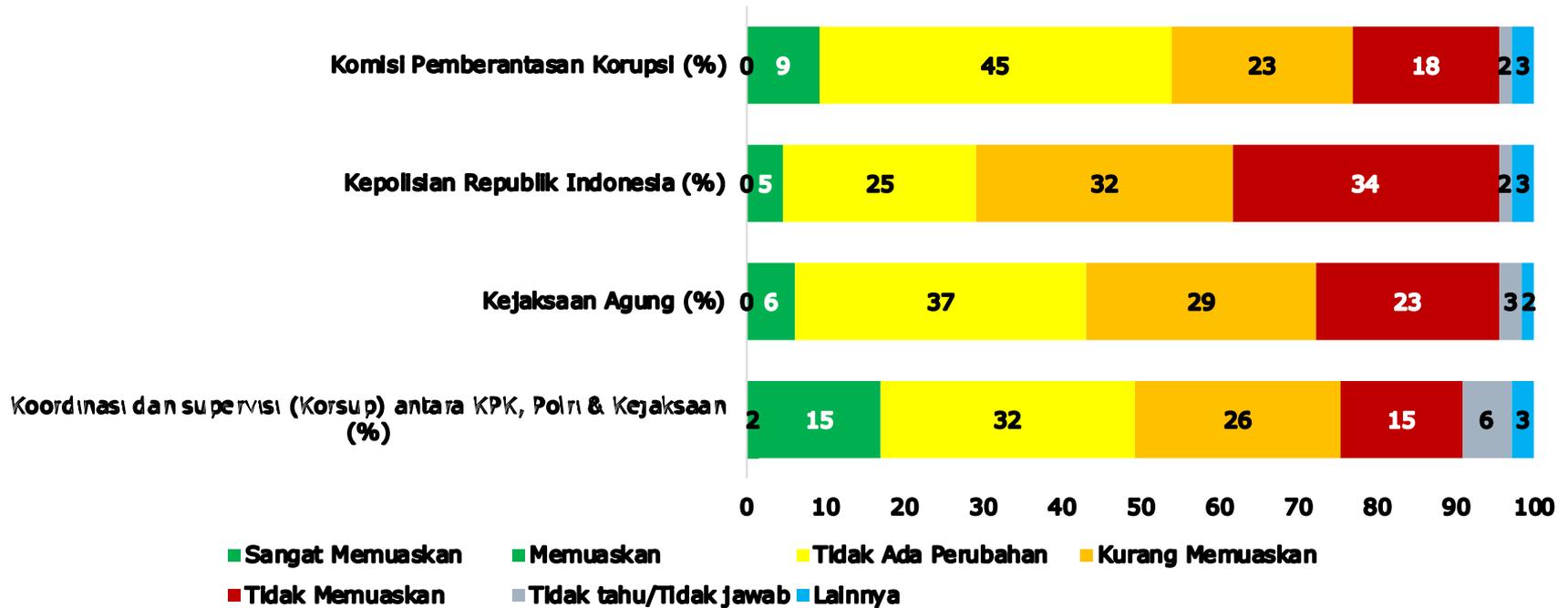
Koordinasi dan supervisi (Korsup) antara KPK, Polri & Kejaksaan (%)



Sebanyak 32% responden merasa fungsi Korsup masih cenderung belum memuaskan. Bahkan telah muncul ada 41% responden yang menilai fungsi Korsup masih pada level mengecewakan. Penilaian ini juga perlu menjadi catatan bagi kinerja tim Stranas PK yang dijalankan oleh KPK

Penilaian terhadap Mesin Anti-Korupsi

Bagaimana penilaian Anda terhadap kinerja Mesin Anti-Korupsi di Indonesia selama setahun belakangan ini?



Di antara 3 lembaga anti-korupsi yang dimiliki Indonesia, Polri dianggap yang masih memiliki pekerjaan rumah (PR) yang besar terkait peningkatan integritas dan kerja anti-korupsinya, disusul Kejaksaan.

Temuan

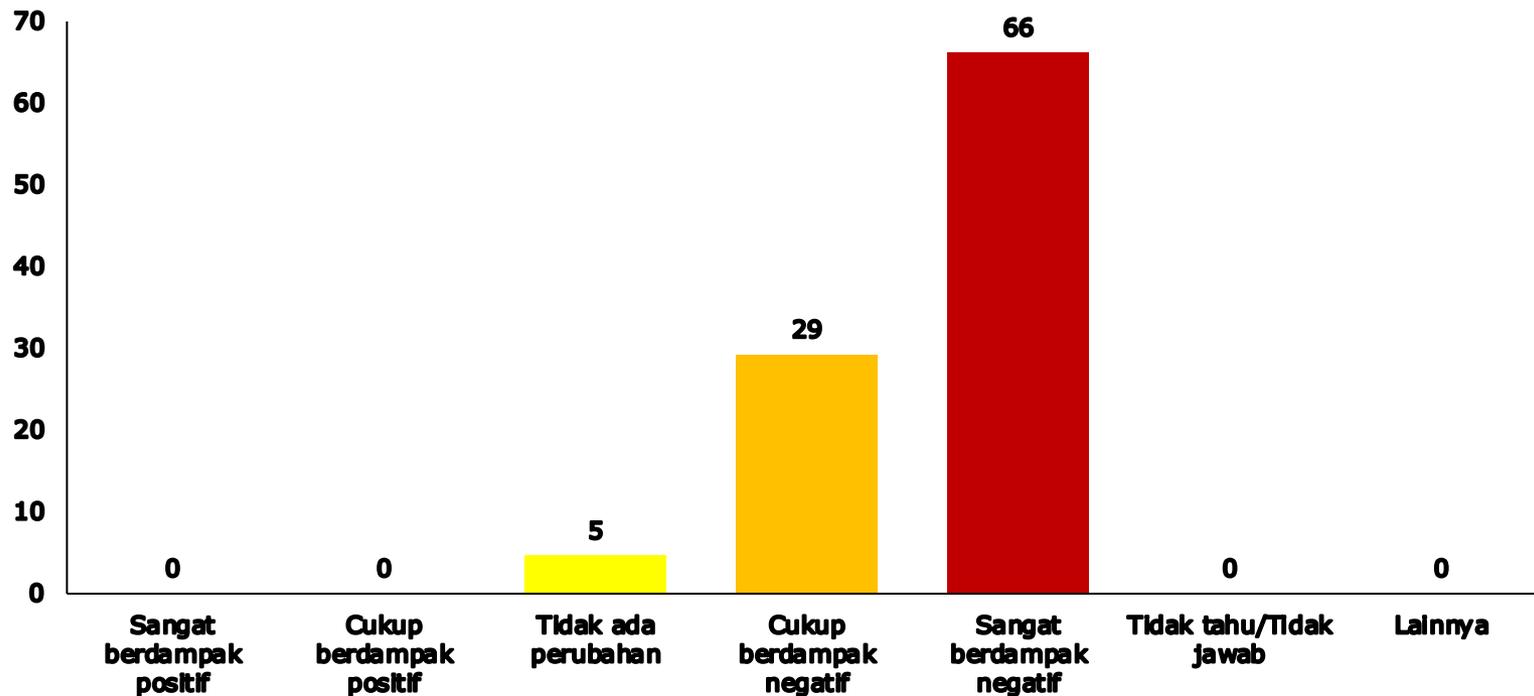
- Dalam lima tahun terakhir, Polri merupakan lembaga yang cukup berhasil melakukan akselerasi peningkatan kepercayaan publik terhadap lembaganya. Namun terkait kerja-kerja pencegahan dan pemberantasan korupsi, kinerja Polri dianggap belum memadai (66%).
- Mayoritas responden (51%) cenderung menilai kinerja Kejaksaan Agung masih belum baik dalam menjalankan fungsi pemberantasan dan pencegahan korupsi.
- Sebanyak 45% responden menilai kinerja KPK belum optimal. Bahkan sudah mulai muncul kekecewaan di kalangan stakeholders terhadap kinerja KPK (41%) yang dinilai masih jauh dari harapan publik.
- Sebanyak 32% responden merasa fungsi Korsupgah cenderung belum memuaskan. Bahkan telah muncul ada 41% responden yang menilai fungsi Korsupgah masih pada level mengecewakan. Penilaian ini juga perlu menjadi lecutan bagi kinerja tim Stranas PK yang dijalankan oleh KPK.
- Di antara 3 lembaga anti-korupsi yang dimiliki Indonesia, Polri dianggap yang masih memiliki pekerjaan rumah (PR) yang besar terkait peningkatan integritas dan kerja anti-korupsinya, disusul Kejaksaan.

Penilaian terhadap Kinerja KPK pasca Revisi UU KPK & Pergantian Kepemimpinan KPK

Kinerja KPK Pasca Revisi UU & Suksesi Kepemimpinan

Bagaimana penilaian terhadap Kinerja KPK pasca Revisi UU KPK & Pergantian Kepemimpinan KPK?

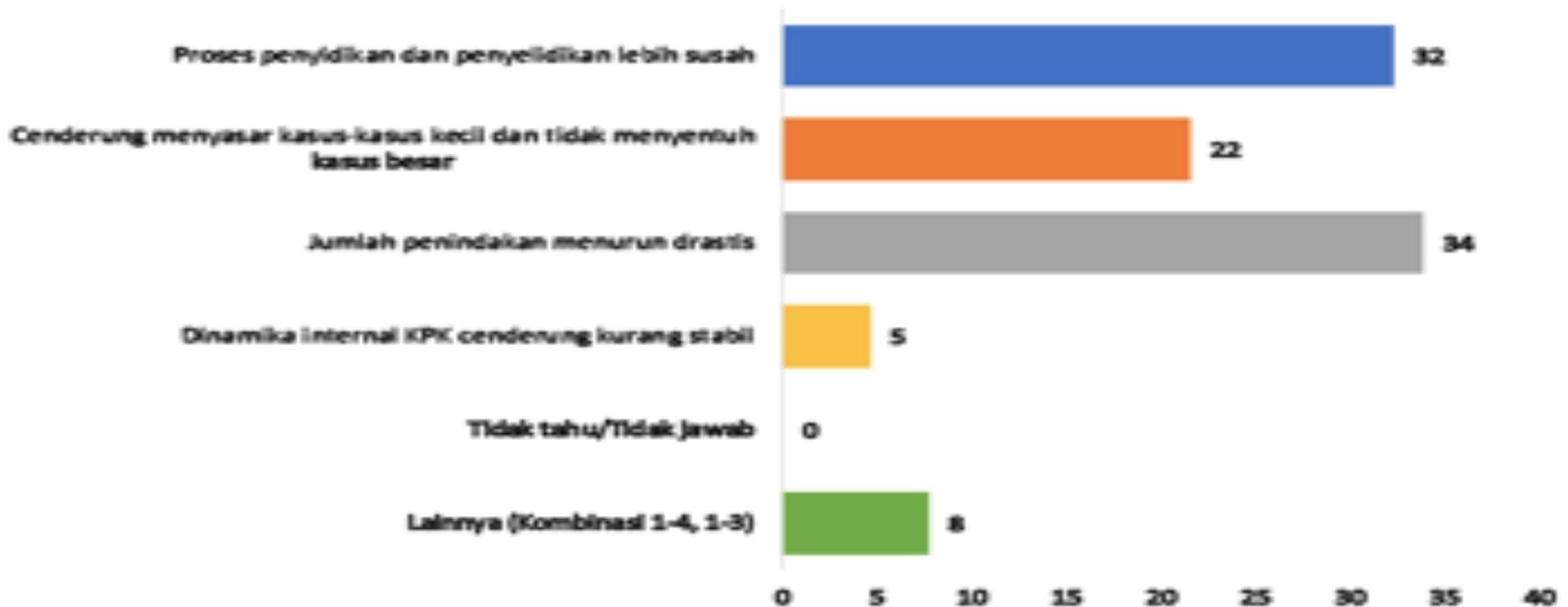
Dampak revisi UU KPK terhadap kinerja KPK (%)



Mayoritas *stakeholders* menilai bahwa revisi UU & pergantian kepemimpinan berdampak negatif terhadap kinerja KPK. Bahkan, persepsi adanya dampak positif terhadap KPK tersapu total (0%)

Kinerja KPK Pasca Revisi UU & Suksesi Kepemimpinan

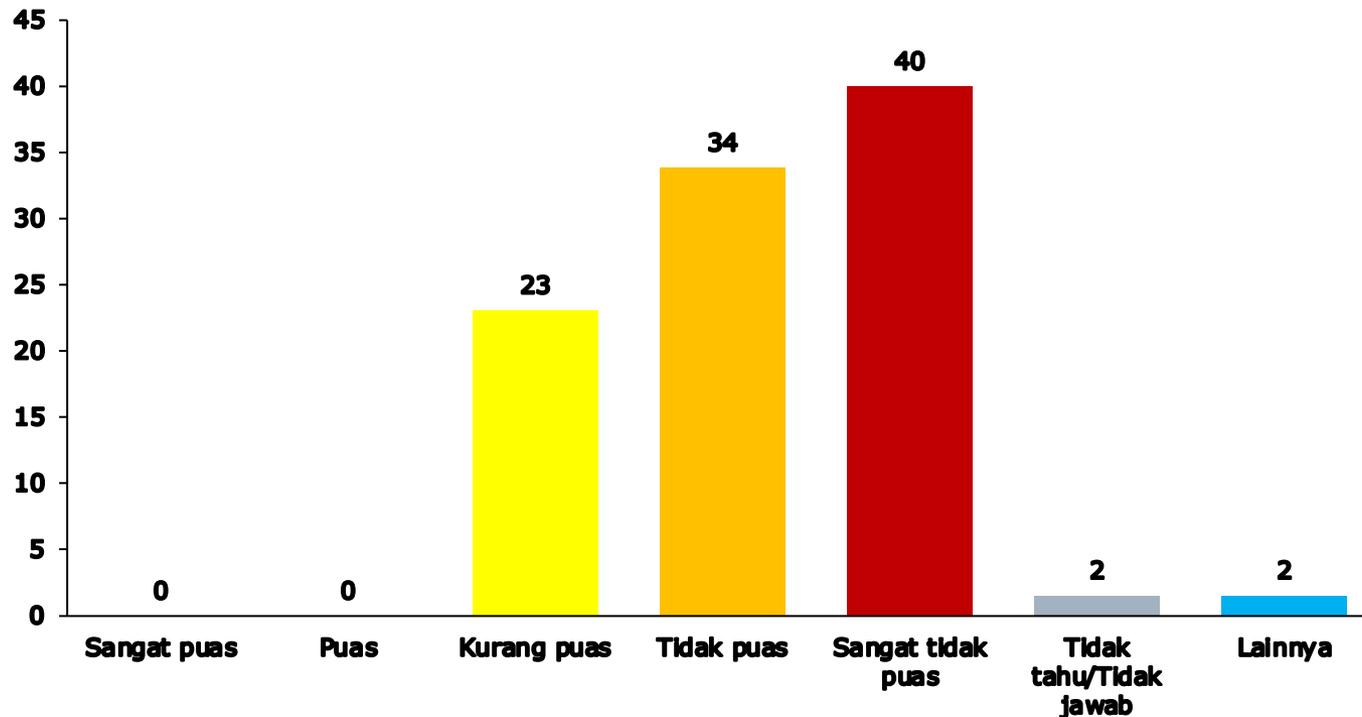
Jika berdampak negatif, pada aspek apa saja perubahan negatif itu terjadi



Mayoritas responden menilai, perubahan UU KPK dan pergantian kepemimpinan KPK berimplikasi pada tidak efektifnya kinerja KPK yang diukur dari penurunan jumlah penindakan secara drastis (34%), semakin susahnya penyidikan dan penyelidikan (32%) dan keengganan KPK menyentuh kasus-kasus besar di lingkaran kekuasaan

Kinerja KPK Pasca Revisi UU & Suksesi Kepemimpinan

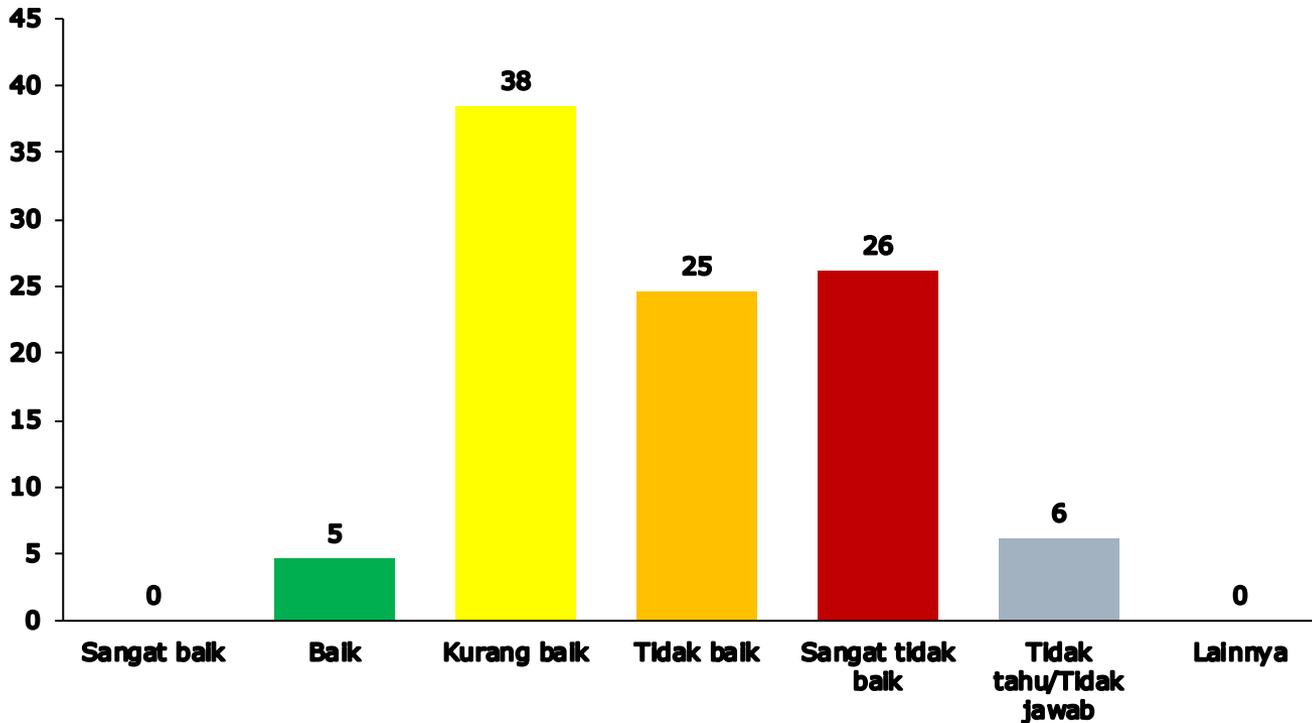
Kinerja pimpinan/komisioner baru KPK periode (2020-2024) (%)



Mayoritas responden (74%) merasa tidak puas terhadap kinerja pimpinan KPK yang baru. Hal ini harus menjadi lecutan untuk meningkatkan kinerja dan kembali meraih kepercayaan publik dan kelompok civil society sebagai garda terdepan pembela KPK.

Kinerja KPK Pasca Revisi UU & Suksesi Kepemimpinan

Relasi pimpinan/komisioner baru KPK periode (2020-2024) dengan elemen masyarakat sipil (%)



Mayoritas responden (51%) menilai hubungan KPK dengan kalangan civil society cenderung tidak baik. Hal ini harus dievaluasi mengingat elemen masyarakat sipil adalah pilar paling sehat bagi demokrasi dan agenda anti-korupsi di Indonesia. Pimpinan KPK baru perlu memahami sejarah bahwa civil society adalah bumper utama bagi pertahanan KPK (Brown, 2009; Bolongaita, 2010; Aspinall, 2012)

Temuan

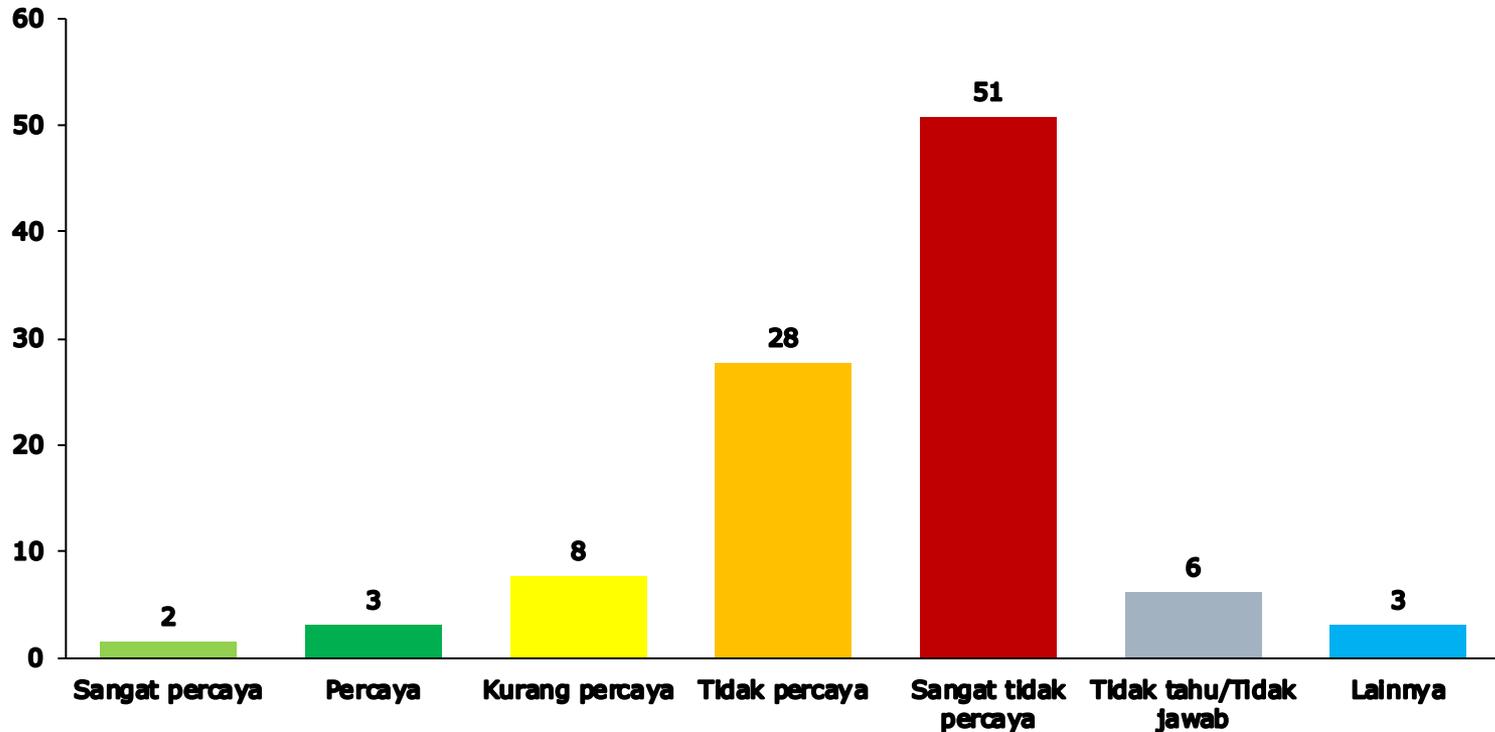
- Mayoritas *stakeholders* menilai bahwa revisi UU & pergantian kepemimpinan berdampak negatif terhadap kinerja KPK. Bahkan, persepsi adanya dampak positif terhadap KPK tersapu total (0%)
- Mayoritas responden menilai, perubahan UU KPK dan pergantian kepemimpinan KPK berimplikasi pada tidak efektifnya kinerja KPK yang diukur dari penurunan jumlah penindakan secara drastic (34%), semakin susahnya penyidikan dan penyelidikan (32%) dan keengganan KPK menyentuh kasus-kasus besar di lingkaran kekuasaan.
- Mayoritas responden (74%) merasa tidak puas terhadap kinerja pimpinan KPK yang baru. Hal ini harus menjadi lecutan untuk meningkatkan kinerja dan kembali meraih kepercayaan publik dan kelompok *civil society* sebagai garda terdepan pembela KPK.
- Mayoritas responden (51%) menilai hubungan KPK dengan kalangan *civil society* cenderung tidak baik. Hal ini harus dievaluasi mengingat elemen masyarakat sipil adalah pilar paling sehat bagi demokrasi dan agenda anti-korupsi di Indonesia. Pimpinan KPK baru perlu memahami sejarah bahwa *civil society* adalah bempere utama bagi pertahanan KPK (Brown, 2009; Bolongaita, 2010; Aspinall, 2012)



ISU LAIN SEPUTAR POLITIK ANTI-KORUPSI

Isu Lain Seputar Politik Anti-korupsi

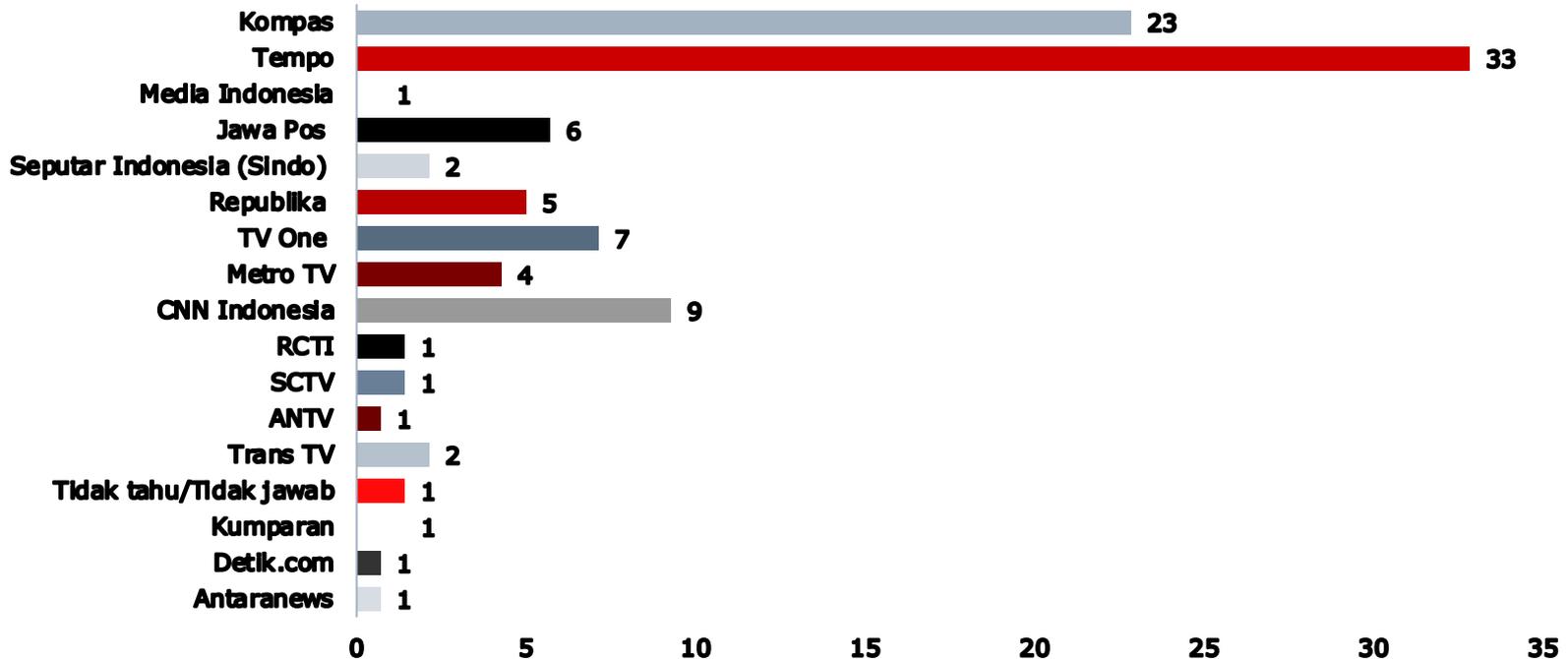
KPK telah menjadi sarang bagi kelompok radikal Islam (%)



Responden yang mayoritas Muslim menyatakan tidak percaya (79%) bahwa KPK telah menjadi "sarang Taliban" atau kelompok radikal kanan yang berusaha memanfaatkan kekuatan KPK untuk agenda politik dan keagamaan mereka

Isu Lain Seputar Politik Anti-korupsi

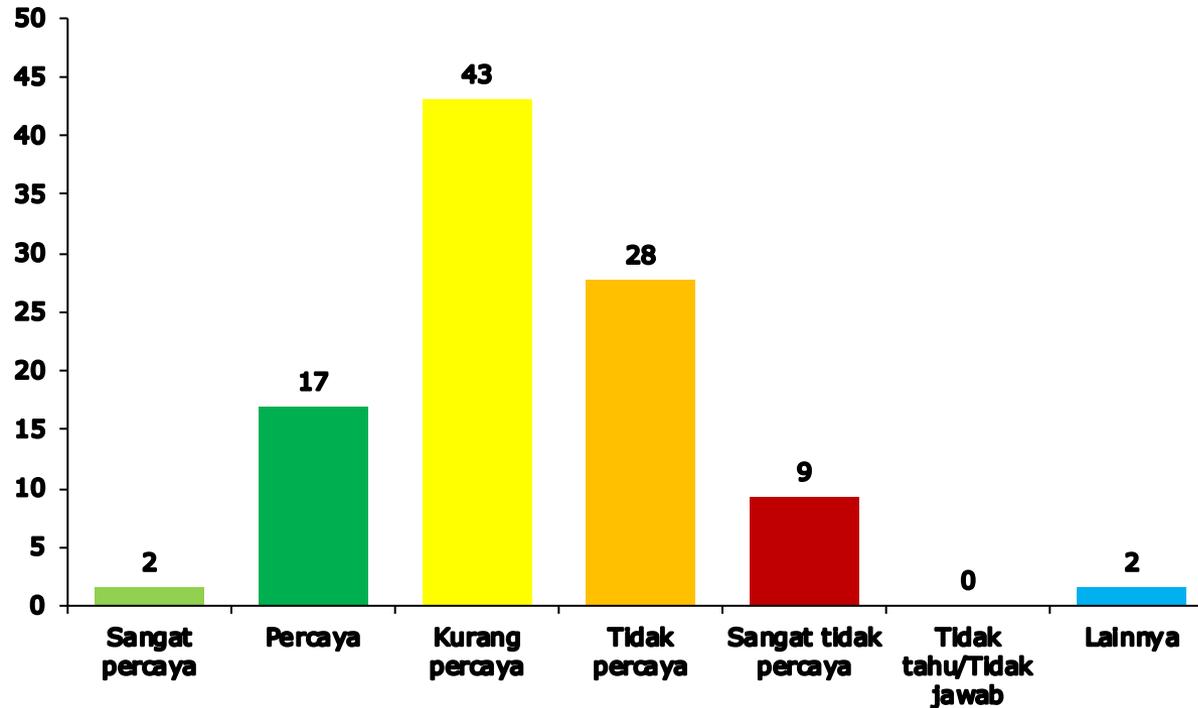
Media nasional yang mendukung agenda anti-korupsi di Indonesia (%)



Di tengah tren kekuatan media yang terfragmentasi (Robison & Hadiz, 2013; Winters, 2013), sebanyak 33 responden menempatkan Tempo sebagai lembaga yang peduli kepada agenda anti-korupsi (33%), disusul Kompas (23%), dan lainnya.

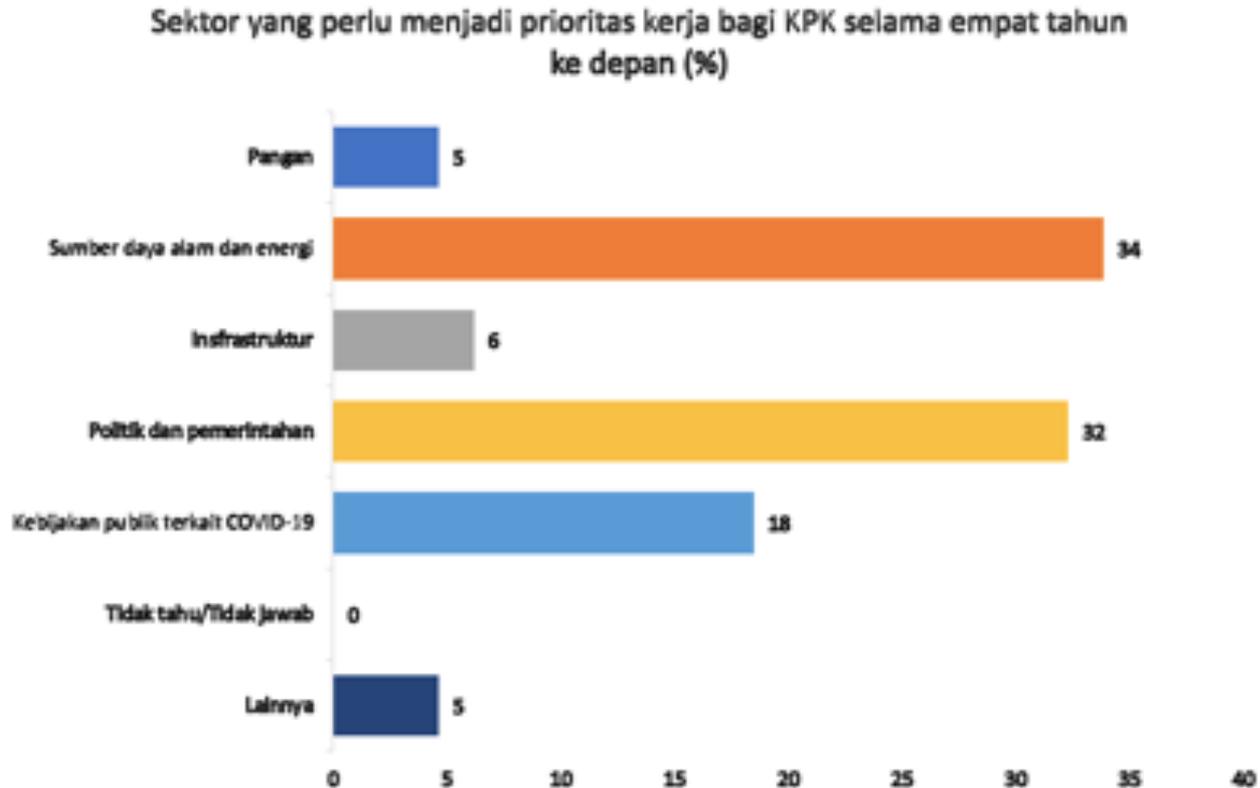
Isu Lain Seputar Politik Anti-korupsi

KPK bisa meningkatkan efektivitas dan perbaikan kinerjanya (%)



Sebanyak 19 persen responden percaya KPK mampu meningkatkan efektivitas mesin anti-korupsinya. Sebaliknya, responden apriori dan tidak percaya akan terjadinya perubahan mengingat struktur dan dinamika kekuasaan yang melingkupinya.

Isu Lain Seputar Politik Anti-korupsi



Sebanyak 34% responden menekankan pentingnya sektor SDA sebagai prioritas kerja KPK, disusul politik dan pemerintahan (32%) sebagai “*the mother of grand corruption*”; selanjutnya, KPK diharapkan fokus pada pengelolaan dana penanganan Covid-19 yang dinilai rawan korupsi

Temuan

- Responden yang mayoritas Muslim menyatakan tidak percaya (79%) bahwa KPK telah menjadi “sarang Taliban” atau kelompok radikal kanan yang berusaha memanfaatkan kekuatan KPK untuk agenda politik dan keagamaan mereka.
- Di tengah tren kekuatan media yang terfragmentasi (Robison & Hadiz, 2013; Winters, 2013), sebanyak 33 responden menempatkan Tempo sebagai lembaga yang peduli kepada agenda anti-korupsi (33%), disusul Kompas (23%), dan lainnya.
- Sebanyak 19 persen responden percaya KPK mampu meningkatkan efektivitas mesin anti-korupsinya. Selebihnya, responden apriori dan tidak percaya akan terjadinya perubahan mengingat struktur dan dinamika kekuasaan yang melingkupinya.
- Sebanyak 34% responden menekankan pentingnya sektor SDA sebagai prioritas kerja KPK, disusul politik dan pemerintahan (32%) sebagai “the mother of grand corruption”; selanjutnya, KPK diharapkan fokus pada pengelolaan dana penanganan Covid-19 yang dinilai rawan korupsi



KESIMPULAN

KESIMPULAN

- Survei ini menemukan adanya kegendahan besar di kalangan *stakeholders* independen terhadap kinerja KPK saat ini. Tantangan KPK akan semakin sulit mengingat “revolusi mental” atau perubahan di pilar-pilar utama Sistem Integritas Nasional (SIN) hampir tidak terjadi. Sehingga, dari 12 pilar SIN yang ada, integritas lembaga Parlemen, Pemerintah, Lembaga Kepresidenan dan Peradilan masih dianggap menyimpan persoalan mendasar dalam upaya penciptaan tata lola pemerintahan dan politik yang bersih.
- Di tengah lingkungan politik dan hukum yang korup, lembaga anti-korupsi akan cenderung menjadi musuh bersama (*common enemy*) lainnya “Ustad di kampung maling”. Akibatnya, para aktor pejuang dan lembaga anti-korupsi cenderung menjadi para pahlawan yang kesepian (*the lonely hero*) dan di-bully oleh kelompok-kelompok yang terusik zona nyamannya dengan membajak instrumen negara.
- Terkait dengan kinerja mesin anti-korupsi, di antara tiga lembaga anti-korupsi yang ada, Polri dianggap yang masih paling bermasalah dengan integritas dan kerja-kerja anti-korupsi. Hal ini harus menjadi penyemangat bagi Polri mengingat Polri merupakan lembaga yang cukup berhasil melakukan akselerasi peningkatan kepercayaan publik selama tiga tahun terakhir ini.

KESIMPULAN

- Sementara itu, basis dukungan dan tingkat kepercayaan para *stakeholders* terhadap KPK juga mulai melemah. Hal ini tidak boleh dibiarkan begitu saja. Jika KPK semakin kehilangan basis dukungan sosial dan politik, maka kekuatan korup akan semakin leluasa untuk mengkonsolidasikan kekuatan ekonomi-politiknya untuk menghancurkan KPK. Karena itu, pimpinan KPK baru harus mengubah ritme kerja dan pola komunikasi dengan kelompok masyarakat sipil.
- Dukungan publik akan kembali diraup KPK jika pimpinan KPK yang baru mampu membuktikan bahwa memang tidak ada hambatan hukum dan resistensi politik, untuk menyentuh kasus-kasus besar dan juga sekaligus menjalankan kerja-kerja pencegahan secara lebih efektif. Masyarakat menaruh harapan besar terhadap kinerja KPK. Untuk itu, KPK harus fokus pada Tupoksinya untuk memperoleh capaian-capaian kinerja yang gemilang.
- Hingga kini, antrian kasus-kasus besar masih belum disentuh oleh KPK; mulai dari kasus buron Harun Masiku, Jiwasyara, Asabri, BLBI, dan lainnya. Jika KPK terkesan enggan, hal itu bisa dipersepsikan masyarakat bahwa bahwa KPK seolah sedang menjadi alat politik untuk mengamankan kelompok kepentingan tertentu.

KESIMPULAN

- Terkait isu lain seputar KPK, responden survei ini juga menolak tuduhan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang menyatakan bahwa KPK telah menjadi “sarang Taliban” atau kelompok radikal kanan yang berusaha memanfaatkan kekuatan KPK untuk agenda politik dan keagamaan mereka. Melalui operasi cyber, narasi itu telah berhasil dimanfaatkan oleh kelompok tertentu untuk menggalang dukungan terhadap upaya pelemahan KPK menjelang amandemen UU KPK Agustus 2019 lalu.
- Selain itu, survei ini juga menemukan rumusan saran kebijakan anti-korupsi KPK ke depan untuk lebih memprioritaskan pada sektor SDA yang membuat kerugian negara dalam skala besar, disusul politik dan pemerintahan (32%) sebagai “*the mother of grand corruption*”, dan juga pada sejumlah dugaan mega-korupsi terkait pengelolaan dana penanganan Covid-19 yang sangat rawan di tengah krisis pandemi ini.



Universitas Paramadina, Jakarta
Jl. Gatot Subroto No.Kav. 97, Mampang
Prapatan, Jakarta Selatan, DKI Jakarta
12790, T+6221 79181188, F:+6221
79181188,
W: <https://policy.paramadina.ac.id>